

Jurnal Skripsi

Perbedaan kondisi perekonomian Indonesia dan China pasca melewati Krisis Keuangan Asia tahun 1997

Oleh : Nafiisa Rosyidayanti

20140510045

Email : nafiisaros@gmail.com

Abstrak

Krisis Keuangan Asia berawal dari Thailand kemudian menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Fenomena ini kemudian menjadi fenomena hubungan internasional karena melibatkan banyak negara yang saling berhubungan di dalamnya. Tidak hanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja yang terkena dampaknya. Namun, negara-negara di kawasan Asia Timur juga mengalami dampak yang serupa, terutama Korea Selatan yang terdampak paling parah. Bahkan, negara-negara di luar Asia, seperti Amerika Serikat pun ikut merasakan dampaknya. Krisis yang berawal dari jatuhnya nilai mata uang Baht di Thailand ditambah lagi pada saat yang sama Thailand juga menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara ini dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini mulai menyebar luas ke negara-negara lain, nilai mata uang di sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan Jepang ikut turun. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengatasi dampak dari krisis tersebut. Begitu juga dengan Pemerintah Cina yang melakukan beberapa upaya agar dapat keluar dari krisis tersebut.

Kata kunci : Perekonomian Cina, Perekonomian Indonesia, *Developmental State*, Krisis Keuangan Asia, Krisis Moneter.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis Keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1999 melanda hampir semua negara di Asia, termasuk Cina. Akan tetapi, Cina dapat terselamatkan dari krisis tersebut. Tentunya ada beberapa upaya yang melatar-belakangi kesuksesan Cina dalam melewati Krisis Keuangan Asia tahun 1997 itu. Cina memiliki kekuatan dan juga kelemahan pasca krisis tersebut berlangsung. Krisis ini bermula di Thailand, jatuhnya nilai mata uang Baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara

dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.

Indonesia dan China adalah ada dua negara yang masuk dalam 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. China menduduki peringkat 1 dan Indonesia berada di peringkat 4. Memiliki jumlah penduduk yang banyak membuat China dan Indonesia harus memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi krisis. Saat terjadinya krisis China juga mengalami kerugian yaitu naiknya tingkat pinjaman bermasalah menjadi 25%. Sistem perbankan yang sudah lemah semakin melemah lagi setelah adanya krisis. Sektor perbankan China menjadi tidak layak secara komersial.

Korea Selatan dan Indonesia dapat melewati krisis ini karena bantuan dari IMF. Sedangkan, China mampu melewati krisis ini bukan karena bantuan dari IMF. China mengalami masa transisi selama 30 tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 2008, dari sistem ekonomi terpusat yang diikuti industrialisasi Uni Soviet yang kemudian menjadi sistem ekonomi pasar. China juga menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing. Sejak saat itu juga, China telah menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sektor teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China.

Cadangan devisa China melonjak dari US \$ 840 juta pada tahun 1979 menjadi US \$ 154,7 miliar pada tahun 1999. Secara absolut, cadangan devisa China berada di peringkat kedua di dunia. Pada tahun 1997 China juga mengalami peningkatan pendapatan domestik bruto hingga 15%. Pada tahun 1998, hutang luar negeri jangka panjang menyumbang 88,1% dari total hutang, sementara hutang jangka pendek hanya menyumbang 11,9%. Berikut adalah tabel yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan PDB China dari tahun 1991-1999.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto China tahun 1991-1999

Tahun	Presentase
1991	4%
1993	13%
1995	13%
1997	15%
1999	8%

Sumber: China Statistical Yearbook.

Sedangkan untuk Indonesia, kondisinya sangat berbeda dengan China. Bagi perbankan Indonesia, krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB).

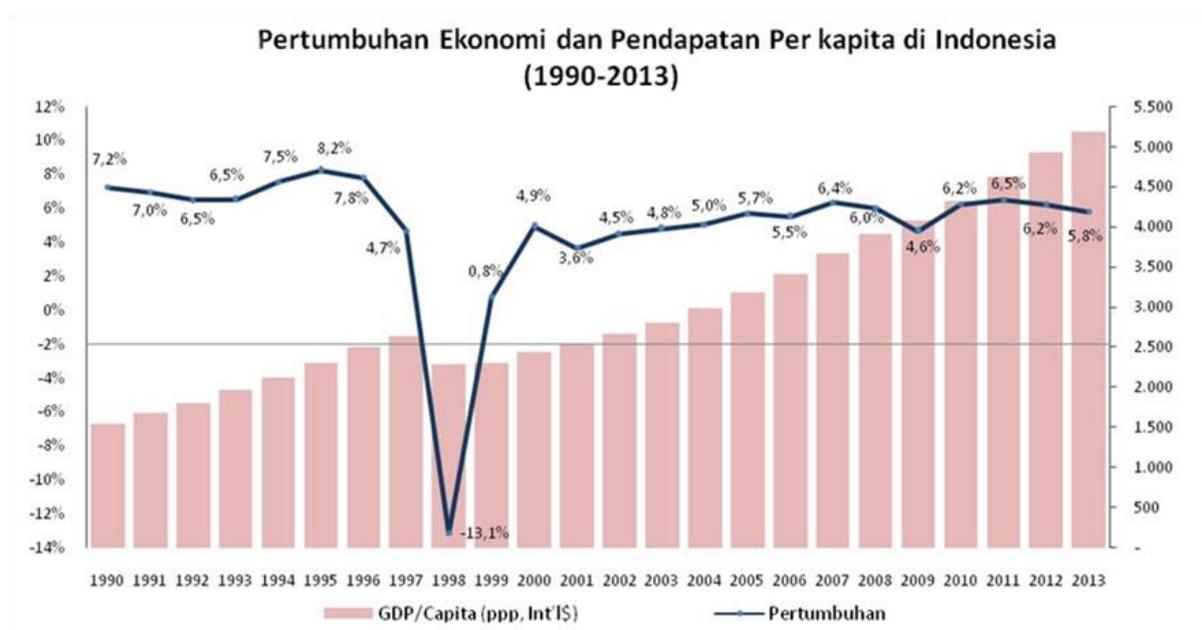
Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Ternyata kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Segera setelah itu masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun.

Maka terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional tergocang. Untuk itu pada Oktober 1997, pemerintah mengundang IMF untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia.

Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000 hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan karena kerusakan Mei 1998.

Pada tahun 1998 pertumbuhan perekonomian dan pendapatan per kapita di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan atau dapat dikatakan terjun bebas sampai pada angka -13,1% seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita di Indonesia



Sumber: data BPS Indonesia

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana perbedaan kondisi perekonomian Indonesia dan China pasca melewati krisis Keuangan Asia tahun 1997?”

C. Landasan Teori dan Konseptual

Dalam penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa “ *Perbedaan kondisi perekonomian Indonesia dan China pasca melewati krisis Keuangan Asia tahun 1997?* ” adalah *Teori Developmental State* oleh Robert Gilpin dan Chalmers Johnson.

1. Teori Developmental State (oleh Robert Gilpin dan Chalmers Johnson)

Teori developmental state atau teori pembangunan negara adalah teori yang membahas relasi antara negara terhadap kegiatan pembangunan di negaranya, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan tersebut dengan prioritas pada aktivitas pembangunan. Dalam teori pembangunan negara, gagasan utama yang diusung berangkat dari pemikiran *state-led development* atau negara sebagai pemimpin pembangunan. Jadi, karena negara memegang peran kunci dalam pembangunan, implementasi dari teori ini menuntut adanya pemerintahan yang baik.

Negara diharuskan cukup kuat dan memiliki kemampuan dalam mengontrol wilayah serta sumber daya yang dimiliki. Cara-cara ini semata-mata dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional tertentu.¹ Menurut Johnson teori pembangunan negara sama sekali tidak menolak investasi asing. Namun, dalam teori ini, investasi yang masuk harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendorong pembangunan serta harus dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Giplin kunci kesuksesan dari pembangunan negara terletak pada pemerintahan, bank lokal, dan industri. Dalam teori ini, kekuatan infrastruktur dan komitmen politik adalah hal penting. Dua hal ini hanya bisa diperankan dengan baik oleh negara atau pemerintah.

Karenanya, proses pembangunan negara setidaknya harus memiliki dua atribut utama, yaitu negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengontrol kekuasaannya dan untuk mendesain serta menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan. Kemudian negara juga harus memiliki strategi yang mumpuni guna mencapai tujuan dan memiliki institusional, serta perspektif politik yang spesifik.

Developmental State tidak hanya menargetkan tujuan untuk pembangunan ekonomi dalam negeri dengan memanfaatkan pasar dalam negeri saja. Perlu diingat bahwa peningkatan kondisi ekonomi yang ditargetkan dalam *developmental state* juga saling berhubungan dengan negara-negara lain, atau dalam tataran perdagangan internasional sebagai bentuk dari liberalisasi perdagangan. Karenanya, setiap negara yang mengimplementasikannya harus memilih strategi yang lebih luas dalam konteks regional dan berkeselimbangan terhadap kekuasaan internasional.

Dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian Indonesia dan China. China sendiri sejak menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* membuat negara-negara lain dan China dapat menjalin kerjasama di berbagai bidang sehingga membuat perekonomian China terus meningkat. Pemerintah China juga memberikan kebebasan pada kegiatan pasar namun semuanya tetap di control dengan baik. Selain itu China juga aktif dalam organisasi internasional seperti World Trade Organisation (WTO), ASEAN Plus Three (APT), Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), China – Asean Free Trade Area (C-AFTA) dan lain lain.

Sedangkan Indonesia sendiri juga aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), The Group of Twenty (G20), Association of South East Asian Nations (ASEAN) dan lain lain. Indonesia juga sangat terbuka pada investasi asing yang akan masuk. Arus modal atau investasi asing yang masuk akan digunakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia juga menerapkan beberapa kebijakan untuk menjaga perekonomian negara agar tetap stabil, antara lain kebijakan devisa, kebijakan nilai tukar, dan sebagainya.

¹ Fritz and A. Rocha Menocal. 2006. *Rebuilding Developmental States: From Theory to Practice*. London: Overseas Development Institute.

D.Hipotesa

Kondisi perekonomian China pada saat krisis berlangsung tidak separah Indonesia. Dimana Indonesia pada saat yang sama juga sedang mengalami Reformasi. Situasi di Indonesia kacau bukan hanya secara ekonomi namun juga secara politik.

China bisa melewati krisis Keuangan Asia pada tahun 1997 disebabkan dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah China dalam hal pertukaran mata uang, kegiatan ekonomi pasar, ataupun masuknya arus modal. Meskipun Pemerintah China memberi kebebasan namun semuanya tetap di kontrol dengan baik sehingga dapat membuat China berada dalam posisi yang aman.

Sedangkan, Indonesia bisa melewati krisis Keuangan Asia Tahun 1997 dengan bantuan IMF dan menerapkan beberapa kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah pada saat krisis, seperti kebijakan devisa, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan hutang luar negeri.

E.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan hasil dari penelitian sebagai salah satu rujukan untuk melakukan riset
2. Menguraikan tentang bagaimanana kondisi perekonomian Indonesia dan China saat melewati Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997
3. Menganalisis menggunakan teori Developmental State untuk menjabarkan tentang kondisi Indonesia dan China saat melewati Krisis Keuangan Asia tahun 1997

F.Metodologi Penelitian

1.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Adapun data yang di kumpulkan adalah melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari jurnal, dokumen-dokumen, website, buku-buku, dan berita baik dicetak maupun elektronik, yang satu sama lain saling berkaitan dan saling melengkapi.

1.2 Teknik Analisis Data

Sejalan dengan tujuan penelitian yang penulis uraikan, maka penulis akan menggunakan model analisis dengan metode deduktif yang menggunakan teori pemikiran dari Giplin dan Johson dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia dan China saat melewati Krisis Keuangan Asia tahun 1997.

G. Jangkauan Penelitian

Adapun jangkauan penelitian pada penulisan ini diawali dari terjadinya Krisis Keuangan tahun 1997, kemudian bagaimana keadaan Indonesia dan China sebelum dan sesudah krisis itu terjadi hingga tahun 2010. Dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan China selama krisis itu berlangsung.

H. Sistematika Penulisan

Pada BAB I Pendahuluan, menjabarkan tentang perbedaan keadaan di Indonesia dan di China saat melewati krisis Keuangan Asia Tahun 1997.

Pada BAB II Penyebab dan Dampak, akan menjabarkan tentang apa saja penyebab terjadinya atau asal mula krisis Keuangan Tahun 1997 tersebut. Serta menjelaskan dengan detail dampak apa saja yang timbul akibat krisis tersebut, baik itu dampak ekonomi ataupun dampak politik, baik secara regional ataupun global.

Pada BAB III Keadaan Pasca Krisis dan Sesudah Krisis, akan menjelaskan bagaimana keadaan kedua negara yaitu Indonesia dan China sesudah krisis tersebut terjadi serta tentu saja pasca krisis tersebut berlangsung. Menjelaskan tentang bagaimana Indonesia dan China berinteraksi dengan krisis tersebut.

Pada BAB IV Kebijakan yang diambil, akan membahas upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh kedua negara yaitu Indonesia dan China dalam melewati krisis Keuangan Asia pada tahun 1997 serta kerjasama apa saja yang dilakukan setelah melewati krisis tersebut.

Pada BAB V Kesimpulan, yang berupa penutup berisi tentang serangkaian penjelasan yang disertai jawaban yang mendukung hasil penelitian tersebut.

2. Penyebab dan Dampak

A. Penyebab krisis

Krisis Keuangan Asia diawali dengan jatuhnya mata uang Baht Thailand pada Juni 1997, akibat ulah para spekulan. Pada saat itu spekulan menjual mata uang Bath dengan harapan dapat menurunkan harga bath yang berharga 26 Bath per 1 Dollar Amerika. Pada akhirnya keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena banyak Bath yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang Bath dan menghabiskan cadangan devisa sebesar USD 6,8. Pada Januari 1998, harga Bath jatuh dengan harga 54 Bath per Dollar Amerika.²

² *Thailand Financial Crisis, it's causes, consequences and implications, March 2007.*

Pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilitasnya perekonomian Thailand saat itu mendorong banyak perusahaan swasta di Thailand untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena melihat perekonomian Thailand yang stabil secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah mengucurkan kredit ke berbagai perusahaan di Thailand. Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka timbul lah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran utang. Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, secara otomatis membuat pasar modal Thailand anjlok pula hingga 75%. Dimulailah krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997. *Finance One* (perusahaan keuangan terbesar di Thailand) ikut mengalami kebangkrutan.

B.Dampak krisis bagi negara lain

Filipina

Krisis di Thailand membawa pengaruh di Filipina. Bank sentral Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1,75 persen pada Mei 1997 dan 2 persen lagi pada 19 Juni 1997. Pada 3 Juli, bank sentral Filipina dipaksa IMF untuk campur tangan dalam menjaga kestabilan Peso Filipina, kemudian bank sentral Filipina mengikuti perintah IMF dengan menaikkan suku bunga dari 15 persen ke 24 persen hanya dalam waktu satu malam saja. Tak berhenti di Filipina, krisis lalu menjalar ke Hong Kong.

Hong Kong

Pada 15 Agustus 1997 seperti yang terjadi di Filipina, suku bunga Hong Kong naik dari 8 persen ke 23 persen dalam waktu yang sangat singkat. Pada Oktober 1997, dolar Hong Kong yang sebelumnya dipatok HK\$7,8 per USD mendapatkan tekanan spekulatif karena inflasi Hong Kong lebih tinggi dibanding Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Pemerintah setempat menghabiskan lebih dari US\$ 1 miliar untuk mempertahankan mata uang lokal. Meskipun adanya serangan spekulasi, Hong Kong masih dapat mengatur mata uangnya yang dipatok ke dolar AS. Pasar modal Hong Kong menjadi tak stabil, antara 20 sampai 23 Oktober, Index Hang Seng jatuh hingga 23 persen.

Korea Selatan

Korea Selatan yang menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-11 dunia, turut menerima imbas krisis Thailand. Meski fundamental ekonomi makro Korsel sangat baik, namun sektor perbankannya dibebani kredit macet luar biasa. Angka *Non Performing Loan* atau NPL yang sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Korsel yang mengalami jatuhnya nilai saham, atau bahkan diakuisisi oleh perusahaan lain. Contohnya pada Juli 1997, Kia Motors yang notabene merupakan produsen mobil terbesar ketiga di Korea, terpaksa meminta pinjaman darurat kepada perbankan. Bursa efek Seoul jatuh sebesar 4 persen pada 7 November 1997. Sehari kemudian, bursa jatuh kembali hingga mencapai angka 7 persen, penurunan terbesar sepanjang sejarah negara tersebut. Pada 24 November, pasar modal jatuh lagi hingga 7,2% karena adanya kekhawatiran IMF akan meminta reformasi yang membebani ekonomi Korsel. Peringkat kredit Korea Selatan turun dari A1 ke A3 pada 28 November 1997, dan turun lagi menjadi B2 pada 11 Desember. Pada tahun 1998, Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors.

Amerika Serikat

Krisis finansial Asia secara tidak langsung membawa Amerika Serikat untuk turut campur di dalamnya. Dampak krisis yang mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat, diantaranya adalah pasar finansial merupakan sebuah kesatuan yang saling berkaitan, sehingga apa yang terjadi dalam pasar finansial Asia, kemudian akan mempengaruhi pasar finansial Amerika Serikat. Bank dan perusahaan milik Amerika Serikat merupakan investor dan kreditor yang signifikan di dalam kawasan Asia di mana hal ini berpengaruh pada perusahaan Amerika Serikat. Berusaha memperbaiki dan memberikan solusi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh program restrukturisasi IMF. Kekacauan krisis finansial mempengaruhi impor dan ekspor Amerika Serikat yang ditandai dengan arus modal dan nilai dari Dollar Amerika Serikat. Krisis finansial menunjukkan kelemahan dari banyak institusi finansial di Asia.

Dalam hal ini, efek dari krisis ekonomi Asia mempengaruhi perekonomian Amerika baik dalam sektor makroekonomi maupun sektor mikroekonomi. Sektor makroekonomi mencakup pertumbuhan suku bunga dan perdagangan. Jika terjadi depresiasi pada mata uang Bath, Dollar Singapura, Rupiah, Yen, Peso serta hambatan dalam pertumbuhan bank dapat menyebabkan kerugian pada perdagangan Amerika Serikat. Dalam sektor mikroekonomi, krisis berdampak pada industri yang spesifik, secara khusus yang berkaitan dengan modal yang ditanamkan oleh para investor. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, maka mayoritas para investor akan mencabut modal yang dimiliki dari negara tersebut.³

Malaysia

Di Malaysia, negara ini mengalami defisit anggaran hingga 6 persen. Pada bulan Juli 1997, Ringgit Malaysia diserang oleh para spekulator. Untuk menyikapi serangan itu, Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan mata uang mengambang atau *floating exchange rate*, tetapi

³ <https://interpretermaxima.wordpress.com/2013/05/13/imf-amerika-serikat-dan-krisis-finansial-asia-1997-1998/>

akibatnya justru Ringgit Malaysia anjlok secara drastis pada 17 Agustus 1997. Empat hari kemudian Standard and Poor's menurunkan peringkat utang Malaysia. Seminggu berselang, peringkat Maybank juga ikut turun, padahal Maybank adalah bank terbesar di Malaysia. Di hari yang sama, bursa efek Kuala Lumpur jatuh 856 poin, dan menjadi titik terendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, Ringgit kembali terjungkal dan membuat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad harus mengambil kebijakan. Meski demikian, mata uang Ringgit tetap saja jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir Mohamad mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia akan menggunakan RM 10 miliar untuk membiayai proyek jalan, rel, dan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut 23,5%, produksi menyusut 9%, dan agrikultur 5,9%. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara ini turun 6,2% pada 1998. Meski ikut mengalami dampak negatif krisis finansial Asia 1997, Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini karena menolak bantuan IMF.

Indonesia

Sebelum terkena dampak dari Thailand, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Menurut catatan Bank Dunia angka kemiskinan di Indonesia menurun dari tahun ke tahun, hingga mencapai 11% dari total penduduk saat itu 11 juta jiwa.⁴ Disamping itu, program Keluarga Berencana juga dinyatakan berhasil mengurangi angka kematian bayi dari sebelumnya 118 kematian per 1000 kelahiran menjadi hanya 52 kasus kematian. Keberhasilan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup yang semula di kisaran 48 tahun menjadi pada kisaran 64 tahun.

Pada Juni 1997, Indonesia mulai mengalami pengaruh krisis Thailand. Tercatat di awal 1997 nilai rupiah stabil di kisaran Rp2000-2300/US\$ lalu menukik tajam hingga lebih dari Rp10000/US\$ dalam waktu satu tahun. Dari situ diketahui pula bahwa ternyata utang korporasi swasta di Indonesia mencapai US\$75 miliar. Selain itu sistem perbankan di Indonesia juga dinyatakan gagal karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari US\$900 juta, dan juga cadangan devisa lebih dari US\$20 miliar. Meskipun Indonesia sudah mendapat bantuan dari IMF namun tetap saja Rupiah semakin anjlok lebih dalam lagi karena adanya pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan US\$ yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah besar-besaran. Dan pasar uang dan bursa efek Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September 1997.

C.Dampak Politik

Krisis finansial Asia membawa perubahan yang besar dalam wilayah Asia pasifik. Dengan adanya krisis, paham-paham seperti kapitalisme dan demokrasi menyebar dalam pemerintahan seluruh negara. Setelah krisis berlangsung banyak negara yang menggunakan paham kapitalisme sebagai sistem perekonomian yang digunakan. Negara-negara yang sekarang mendapat julukan NIC's (*New Industrial Countries*) yaitu Korea selatan, Singapura,

⁴ Weber, E.J. *The IMF and Indonesia: Two Equal Partners*, 1998.

Hongkong, Taiwan sukses dalam membangun perekonomian wilayah. Bukan hanya negara-negara maju tersebut, negara-negara seperti Indonesia, Thailand juga mulai membuka perekonomian untuk menarik investor asing masuk untuk menanamkan modal. Seperti contoh dapat dilihat pada contoh berkembangnya bisnis properti di Indonesia yang diminati oleh para konglomerat dan bank- bank pemerintah.

Selain menyebarnya paham kapitalisme, penerapan demokrasi pun marak di gunakan dalam sistem pemerintahan negara-negara Asia, khususnya yang terkena dampak krisis terbesar seperti Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan. Mayoritas sistem pemerintahan negara tersebut sebelum krisis merupakan pemerintahan yang bergaya otoritarianisme. Pemerintahan model tersebut sangat mengekang kebebasan dalam berpolitik. Media massa dilarang berbicara, rakyat harus seminimal mungkin berperan dalam pemerintahan. Jika terdapat masalah dalam pemerintahan, maka penyelesaiannya adalah dengan cara militer yang otoriter.

Terjadinya krisis menjadi sebuah kesempatan untuk menumbangkan rezim otoritarian tersebut. Negara-negara tersebut mengalami perubahan rezim yang pada awalnya otoritarian berubah menjadi demokrasi. Seperti contoh krisis pada tahun 1998, menumbangkan rezim Soeharto yang telah berkuasa hampir 32 tahun dalam pemerintahan Indonesia. Rezim tersebut tumbang pada saat kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 dan digantikan oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi.

D.Dampak Ekonomi

Bukan saja hanya menyerang Thailand, krisis moneter 1997 menjadi fenomena krisis moneter yang mendunia menjalar ke berbagai kawasan di Asia Pasifik seperti Kuala Lumpur, Jakarta, Manila dan bahkan Singapura. Kurs mata uang domestik terhadap Dollar mengalami depresiasi hebat yang mencapai sepertiganya, yang dihitung melalui perhitungan IMF, atau dapat disebut terdepresiasi setengahnya bila dilihat dari perhitungan domestik. Di Malaysia, Mata uang dalam negeri (Ringgit) kehilangan hampir 27% nilainya dibanding Dollar Amerika Serikat.

Di wilayah Korea, tingginya aliran modal asing yang masuk, membuat ekonomi Korea Selatan menjadi sensitif terhadap fluktuasi kepercayaan investor, apalagi ditambah dengan kekhawatiran investor terhadap krisis yang terus menerus menjalar.

Selain itu, pesatnya pertumbuhan perbankan menyebabkan persaingan semakin ketat sehingga mendorong meningkatnya jumlah bank kecil yang jumlah modalnya dinilai berada di bawah standar modal minimum yang telah ditetapkan, hal ini terjadi di Indonesia tahun 1994 disaat pendirian bank swasta meningkat tajam, hingga mengungguli Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

E.Perekonomian China sebelum krisis

Era Deng Xiaoping

Pada tahun 1978 sampai pada tahun 2008, China mengalami masa transisi yaitu dari sistem ekonomi terpusat yang diikuti industrialisasi Uni Soviet, yang kemudian menjadi sistem ekonomi pasar. Pada masa kepemimpinan Deng Xioping, Cina mulai mengadopsi kebijakan yang pragmatis dengan menjadikan ekonomi domestik sebagai fokus utama politik luar negerinya, melalui penerapan open door policy.

Pada awal tahun 1990-an, Cina membangun perekonomiannya melalui perdagangan, bantuan luar negeri, serta *Foreign Direct Investment*. Kondisi ini memantapkan Cina untuk semakin meluaskan pasar dalam pasar global, melalui penggabungan dengan WTO, World Bank, The Asian Development Bank, dan APEC. Transformasi ekonomi dan integrasi Cina dalam pasar global menjadi salah satu perkembangan ekonomi dunia yang sangat dramatis. Pertumbuhan produk domestik Cina rata-rata hampir mencapai angka delapan persen dan membuat Cina menempati peringkat enam besar ekonomi dunia.

Melesatnya pertumbuhan ekonomi Cina diikuti dengan kondisi yang agak memprihatinkan seperti kondisi perbankan yang memiliki kredit bermasalah, pengangguran, dan juga ketimpangan pendapatan dalam negeri, antara daerah pusat dengan daerah nonpusat. Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998, misalnya, ditanggulangi forum National People's Congress dengan meredefinisikan perusahaan melalui privatisasi dan minimalisasi peran pemerintah.

F. Perekonomian Indonesia sebelum krisis

Era Presiden Soeharto

Era Presiden Soeharto atau biasa yang disebut dengan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun yaitu dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Laju pertumbuhan ekonomi terhenti dan sebegini besa produksi juga terhenti pada tahun 1966 sampai 1969 yang mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita. Defisit anggaran belanja pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan kredit dari BI meningkat tajam dari 63% dari penerimaan pemerintah tahun 1966 menjadi 127% tahun 1969.

Selanjutnya, laju inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar dan krisis pangan akhir tahun 1972. Laju inflasi memuncak hingga 41% tahun 1974. Selain itu terjadi devaluasi rupiah sebesar 50% pada November 1978.

Bulan September 1984, Indonesia mengalami krisis perbankan, yang bermula dari deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank negara untuk memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit macet, serta bebas untuk menentukan tingkat suku bunga, baik deposito berjangka maupun kredit. Masalah-masalah tersebut terus berlangsung hingga terjadi krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997.

3. Keadaan China dan Indonesia pasca krisis dan sesudah krisis

A. China pasca krisis

China mampu tetap bertahan melewati krisis ini bahkan sukses bukan karena bantuan dari IMF. China mengalami masa transisi selama 30 tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 2008, dari sistem ekonomi terpusat yang diikuti industrialisasi Uni Soviet yang kemudian menjadi sistem ekonomi pasar. China juga menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing. Sejak saat itu juga, China telah menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sektor teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China. Tahun dimana China meluncurkan kebijakan reformasi dan keterbukaannya yaitu tahun 1979-1981 membuat cadangan emas China tetap tidak berubah. Sementara cadangan devisa China melonjak dari US \$ 840 juta pada tahun 1979 menjadi US \$ 154,7 miliar pada tahun 1999. Secara absolut, cadangan devisa China berada di peringkat kedua di dunia. Pada tahun 1997 China juga mengalami peningkatan pendapatan domestik bruto hingga 15%. Pada tahun 1998, hutang luar negeri jangka panjang menyumbang 88,1% dari total hutang, sementara hutang jangka pendek hanya menyumbang 11,9%.

B.Indonesia pasca krisis

Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah terus merosot. Di bulan Agustus 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.500,00 menjadi Rp2.650,00 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Padahal, pada saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin menipis. Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar (ketika nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar), kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka. Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang

dimaksud fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.

Kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut.

C.China setelah krisis

Reformasi China yang dimulai pada tahun 1978 telah membuat pertumbuhan investasi, konsumsi, dan standar hidup di Cina mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, masih banyak orang Cina yang belum dapat menikmati hasil dari perkembangan perekonomian. Perekonomian Cina sebenarnya belum sepenuhnya bebas karena pemerintah yang berkuasa saat ini yaitu Partai Komunis Cina masih turun secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonominya dengan beberapa perusahaan milik pemerintah China.

Misalnya pada saat krisis 2008-2009, pemerintah secara hati-hati bertindak langsung dalam menangani krisis di Cina, sehingga Cina dapat tumbuh positif pada saat itu. Dengan kombinasi mekanisme pasar dan peran pemerintah yang tepat membuat perekonomian China dapat terhindar dari krisis 2008-2009.

Pesatnya perkembangan ekonomi Cina ditopang dengan pertumbuhannya yang merupakan tertinggi di dunia dengan pertumbuhan rata-rata 10% dalam 30 tahun terakhir. Selain itu, Cina juga merupakan negara kreditur terbesar di dunia dan memiliki kira-kira 20,8% dari kepemilikan asing obligasi pemerintah Amerika Serikat. Dan banyak lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan Standard Chartered Bank yang memprediksi perekonomian Cina akan menyamai Amerika Serikat pada tahun 2020.

Tabel 2.2 Kegiatan Ekspor dan Impor China

Tahun	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Exports	194.9	249.2	266.2	325.6	438.2	593.3	762.0	969.1	1,218.6	1,428.5
% change	6.1	27.8	6.8	22.4	34.6	35.4	28.4	27.2	25.7	17.2
Imports	165.7	225.1	243.6	295.2	412.8	561.2	660.0	791.6	955.8	1,133.1
% change	18.2	35.8	8.2	21.2	39.8	36.0	17.6	20.0	20.8	18.5
Total	360.6	474.3	509.8	620.8	851.0	1,154.6	1,421.9	1,760.7	2,173.8	2,561.6
% change	11.3	31.5	7.5	21.8	37.1	35.7	23.2	23.8	23.5	17.8
Balance	29.2	24.1	22.5	30.4	25.5	32.1	102.0	177.5	262.2	295.5

Sumber : Laporan Tahunan yang di keluarkan oleh *China Department General of Statistics*

Prosedur dalam mendirikan sebuah usaha investasi asing di Cina, pemerintah Cina menerapkan sejumlah peraturan yang dapat menjawab berbagai persoalan, seperti manajemen tenaga kerja, pendaftaran usaha patungan, dan kontribusi modal. Liberalisasi serta kelonggaran terhadap batasan-batasan dalam penanaman modal dan pendirian perusahaan-perusahaan di Cina, adalah sejalan dengan keinginan Cina untuk menerapkan kebijakan reformasi dan membuka diri dan mewujudkan keinginan Cina untuk dapat bergabung dalam keanggotaan WTO.

Cina juga mengalirkan dananya keluar negeri untuk memacu pertumbuhan di dalam negerinya. Pada awalnya Cina tidak dikenal sebagai negara pengekspor investasi yang penting. Namun, menjelang akhir 2004, Cina sudah mendirikan 8.299 perusahaan di luar negeri dan memiliki angka kumulatif ODI (Outward Direct Investment) lebih dari US\$44,8 milyar di 150 negara. Menurut data statistik Kementerian Perdagangan Cina (Ministry of Commerce/ MOFCOM) pada tahun 2005, tercatat aliran kumulatif ODI sebesar US\$ 57,2 milyar, ini merupakan sepersepuluh dari semua aliran FDI dari negara berkembang.

D.Indonesia setelah krisis

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%⁵

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia.

Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.

⁵ data.worldbank.org

Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)

Harga	2004	2009	Catatan
Minyak Mentah Dunia / barel	~ USD 40	~ USD 45	Harga hampir sama
Premium	Rp 1810	Rp 4500	Naik 249%
Minyak Solar	Rp 1890	Rp 4500	Naik 238%
Minyak Tanah	Rp 700	Rp 2500	Naik 370%

Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triliun dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.

4.Kebijakan yang diambil dan Kerjasama yang dilakukan

A.Upaya yang dilakukan China dalam menghadapi krisis

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh China dalam menghadapi krisis tersebut yang pertama adalah menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing.

Kedua, China juga menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sector teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China.

Ketiga, Pemerintah China melonggarkan kontrol pada akun giro, namun masih memperhatikan serangkaian kontrol pertukaran pada akun modal. Langkah keempat, Pemerintah China juga bijak dalam mengontrol arus masuk modal atau investasi dan juga menggunakan kebijakan moneter yang terkendali.

Kelima, Pemerintah China memberikan kebebasan pada penduduk maupun bukan penduduk agar dapat membeli mata uang asing untuk transaksi modal atau meminjam Renmibi untuk penjualan ke depan secara bebas namun dalam jumlah yang telah dibatasi oleh Pemerintah.

Terakhir, China mampu mengatur dengan baik arus modal yang masuk berbentuk investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI), yaitu investasi riil di pabrik, peralatan modal, dan fasilitas produktif lainnya.

Adanya kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah China dalam hal pertukaran mata uang, kegiatan ekonomi pasar, ataupun masuknya arus modal, semuanya tetap di kontrol dengan baik sehingga dapat membuat China berada dalam posisi yang aman jika dibandingkan dengan negara negara lain.

Selain itu, China juga memiliki juga memiliki cadangan devisa yang cukup besar yaitu senilai lebih dari US\$154,7 miliar sehingga ketika negara negara lain mulai jatuh setelah adanya krisis, seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan lain lain, China masih tetap stabil walaupun negara negara mitra nya tidak. Hubungan bilateral yang terjalin antara China dengan negara negara di Asia, khususnya Asia Tenggara masih tetap berlangsung setelah adanya krisis keuangan Asia.

B.Kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam menghadapi krisis

Langkah-Langkah Strategis 1997-1999

Untuk mengurangi tekanan depresiasi Rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan system nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan.

Untuk mengurangi tekanan depresiasi Rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan system nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan. Berbagai langkah tidak sepenuhnya berhasil menahan laju depresiasi rupiah karena krisis dimaksud dalam waktu singkat telah berkembang dari semula krisis

moneter menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis politik sehingga menjadi krisis multidimensi.

Kebijakan hutang luar negeri 1997-1999

Berkaitan dengan penyelesaian hutang luar negeri jangka pendek perusahaan swasta, Pemerintah membentuk INDRA yang berfungsi sebagai lembaga perantara antara perusahaan debitur dan kreditur luar negeri. Dalam perkembangannya, INDRA melakukan penyesuaian atas skim-skim kredit tersebut. Berkaitan dengan program INDRA, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Prakarsa Jakarta yang berfungsi sebagai fasilitator bagi perusahaan-perusahaan yang menghadapi masalah dalam menyelesaikan pinjamannya sehingga debitur dapat memilih untuk mengikuti program INDRA atau memilih cara lain, seperti *debt to equity swap* dan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 1998 satuan tugas tersebut telah menangani 122 kasus dengan nilai utang sebesar USD15,5 milyar. Dalam hal hutang luar negeri sektor pemerintah, dilakukan upaya restrukturisasi melalui penandatanganan MOU Paris Club pada 23 September 1998 dengan kreditur yang diwakili oleh 17 negara donor. Perjanjian tersebut menandai adanya penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dalam masa konsolidasi, yakni terhitung sejak awal Agustus 1998 hingga akhir Maret 2000. Berdasarkan MOU Paris Club, pinjaman yang akan direstrukturisasi berjumlah USD4,2 milyar, terdiri dari pinjaman lunak sebesar USD1,2 milyar dan fasilitas kredit ekspor sebesar USD3 milyar. Pinjaman lunak dijadwalkan kembali atau dibiayai dengan pinjaman baru berjangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak. Fasilitas kredit ekspor dibiayai kembali atau dijadwalkan dengan jangka waktu 11 tahun, termasuk masa tenggang 3 tahun dengan tingkat bunga pasar.

C.Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia

Indonesia dengan Singapura

Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura, Lee Hsien Loong telah bertemu dalam kerangka Leaders' Retreat di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI dan PM Singapura menyambut baik berbagai perkembangan positif dalam hubungan bilateral, khususnya sejak Leaders' Retreat di Bogor.

Kedua Pemimpin juga menegaskan kembali komitmen bersama untuk senantiasa memajukan dan memperkuat hubungan bilateral ke depan. Kedua Pemimpin secara khusus menyambut

gembira perkembangan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan telah terbangun sangat baik. Hubungan perdagangan telah secara konsisten bergerak ke arah yang positif selama beberapa tahun terakhir.⁶

Dalam hal ini, Singapura merupakan negara asal investor terbesar bagi Indonesia, sementara Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Singapura diantara negara-negara ASEAN lainnya. Presiden RI dan PM Singapura menyambut baik perkembangan positif dalam enam working group di bidang ekonomi yang terbentuk sejak Leaders' Retreat 2010. Working Group Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya dan Working Group di bidang Investasi telah berhasil meningkatkan investasi di BBK dan kawasan lain, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Disamping itu, kedua Pemimpin juga membahas upaya bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pertahanan dan intelijen.

Selain itu, Indonesia dan Singapura juga bekerjasama dalam bidang Pendidikan. Komitmen kerja sama di bidang pendidikan vokasi, juga terimplementasi melalui penandatanganan MoU antara Menperin RI dengan Menteri Pendidikan Singapura, Technical Arrangement (TA) antara Sekjen Kemenperin dengan Direktur Kampus Institute of Technical Education (ITE) Singapura, dan Collaborative Agreement antara KapUS\$ iklat Industri dengan ITE Education Services (ITEES) Singapura. Lebih lanjut, Menperin menyampaikan, sebanyak 25 kepala sekolah dan guru dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Indonesia akan mengikuti pelatihan kepemimpinan di Kampus ITE Singapura.⁷

Indonesia dengan Brunei Darussalam

Hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam bisa dibilang sangat hangat dan ramah, tidak ada masalah satupun yang terjadi antara kedua belah pihak, bahkan saat Indonesia sedang krisis ekonomi, Brunei Darussalam tetap menjaga kerjasama antara kedua belah pihak.

Pada bulan November 1999, kedua negara sepakat untuk membentuk Komisi Bersama pada tingkat Menlu untuk menggali berbagai potensi kerjasama di antara kedua negara. Pertemuan Komisi Bersama yang pertama berlangsung di Jakarta tanggal 25 Juli 2003, sementara pertemuan kedua (terakhir) diadakan di Bandar Seri Begawan tanggal 18 Agustus 2006.

⁶ <https://news.detik.com/berita/3662276/dubes-ri-ingin-hubungan-bilateral-dengan-singapura-ditingkatkan>

⁷ <https://finance.detik.com/industri/d-3872536/ri-singapura-tingkatkan-kerja-sama-industri>

Pada kesempatan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara lain perdagangan, kebudayaan, pertahanan, kesehatan, penerangan, ketenagakerjaan serta mendorong peningkatan hubungan antarswasta dan masyarakat kedua negara.⁸

Kerjasama yang masif selanjutnya antara Indonesia dan Brunei Darussalam adalah dalam bidang perdagangan. Dalam bidang ini kedua negara bekerja sama karena kedua negara saling melengkapi dalam beberapa sektor. Brunei memiliki komoditas mineral yang mereka andalkan sebagai barang ekspor mereka terhadap Indonesia. Nilai total perdagangan antara Indonesia dan Brunei Darussalam pada tahun 2008 mencapai US\$ 2,476 milyar, naik dari total perdagangan tahun 2007, yaitu sejumlah US\$ 1,9 milyar.⁹ Pertumbuhan pendapatan kedua negara karena hubungan yang terjalin terus meningkat setiap tahunnya. Diatas 10% setiap tahunnya. Neraca perdagangan kedua negara khususnya selama lima tahun terakhir menunjukkan defisit bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia banyak mengimpor minyak dari Brunei Darussalam.

Selain perdagangan, Indonesia juga menawarkan Brunei untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia mempromosikan keadaan ekonomi yang kondusif, iklim investasi yang bagus dan kebijakan fiskal yang tidak menyulitkan investor. Ada beberapa sektor investasi yang ditawarkan kepada Brunei Darussalam, yaitu proyek infrastruktur seperti energi (10,000 MW) dan pembuatan jalan tol Trans Jawa. Semua ini dijadikan senjata andalan untuk menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

D.Kerjasama yang dilakukan oleh China

China dan Singapura

Hubungan Cina dengan Singapura dalam perdagangan ekonomi bilateral meningkat dari US \$ 5,2 Milyar mencapai US \$ 21.6 Milyar dari tahun 1990 sampai 2000, hamper mencapai empat kali lipat dalam satu dekade. Dari 2000 sampai 2007, dari US \$ 21.6 Milyar mencapai 91,6 Milyar.

Pada tahun 2006, Cina telah menjadi Partner perdagangan terbesar Singapura, setelah Malaysia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2008, Singapura dan Cina memutuskan sebuah Perdagangan Bebas (FTA) selama periode Perdana Menteri Lee Hsien Loong

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/08/07401031/Indonesia-Brunei.Jalin.Kerja.Sama.Kesehatan.dan.Perdagangan>

⁹ <https://www.kompasiana.com/hilmy-fadhilah/5a95599fcbe52360975baf42/hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-brunei-darussalam>

mengunjungi Beijing. Perdagangan Bebas ini merupakan hal pertama bagi pemerintah Cina dengan Negara Asia.

Hal itu menggambarkan bahwa kedua negara, Cina dan Singapura sepakat untuk membuka hubungan yang terbuka, dan mempromosikan perdagangan bebas. Kesepakatan ini juga diharapkan memaju investasi dan perdangan yang lebih kuat anantara kedua negara. China-Singapura Suzhou Industrial Park adalah salah satu taman industry internasional dengan teknologi tinggi, mirip seperti taman urban modern disekitar danau Jinji.¹⁰

China dan Malaysia

Malaysia dan China menandatangani perjanjian Program Lima Tahun Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan dari tahun 2013 hingga 2017 yang bertujuan memperkuat kerjasama bilateral dalam berbagai sektor. Penandatanganan perjanjian itu disaksikan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden China, Xi Jinping ketika mereka menghadiri Sidang Kemuncak Ekonomi Malaysia-China di Kuala Lumpur.

Dalam perjanjian itu, Malaysia diwakili Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustapa Mohamed sedangkan China oleh Menteri Perdaganganannya, Gao Hucheng. Selain itu, kedua negara juga menandatangani perjanjian guna membangun Majlis Kerjasama bagi Taman Perindustrian China-Malaysia di Qinzhou dan Taman Perindustrian Malaysia-China di Kuantan, Pahang. Najib mengatakan bahwa program itu akan menguatkan lagi hubungan kedua negara sekaligus menjadi penanda langkah seterusnya dalam memperkuat kerjasama pada masa akan datang. Perdana Menteri berkata, pembangunan kampus Universiti Xiamen Malaysia juga akan memperkuat hubungan kedua negara.¹¹

China dan Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman maupun hasil kekayaan alam. Atas potensi tersebut banyak negara yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia salah satunya adalah negara China. China merupakan negara yang penduduknya terpadat di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan China terutama dalam bidang

¹⁰ <https://www.merdeka.com/politik/singapura-cina-tingkatkan-hubungan-bilateral-zox1thb.html>

¹¹ <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2018/05/342872/hubungan-diplomatik-china-malaysia-lebih-kukuh>

ekonomi saat ini terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya nilai jual beli antara Indonesia dan China pada tahun 2008 yang mencapai US\$ 31 miliar.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati kerja sama pada delapan bidang. Penandatanganan nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dilaksanakan di Great Hall of The People oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping.¹²

Terdapat 8 MoU yang ditandatangani, yaitu :

1. Nota kesepahaman kerja sama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT,
2. Nota kesepahaman kerja sama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.
3. Nota Kesepahaman kerja sama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT.
4. Kerja sama antara Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara.
5. Kerangka Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa RRT.
6. Nota kesepahaman kerja sama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan.
7. Nota kesepahaman antara pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara dan
8. Nota kesepahaman kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.

5.KESIMPULAN

Krisis Keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1999 melanda hampir semua negara di Asia, termasuk China. Akan tetapi, China dapat terselamatkan dari krisis tersebut. Tentunya ada beberapa upaya yang melatar-belakangi kesuksesan China dalam melewati Krisis Keuangan Asia tahun 1997 itu. China memiliki kekuatan dan juga kelemahan pasca krisis

¹² <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-Hubungan-Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-Tiongkok.aspx>

tersebut berlangsung. Krisis ini bermula di Thailand, jatuhnya nilai mata uang Baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.

Indonesia dan China adalah ada dua negara yang masuk dalam 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. China menduduki peringkat 1 dan Indonesia berada di peringkat 4. Memiliki jumlah penduduk yang banyak membuat China dan Indonesia harus memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi krisis. Saat terjadinya krisis China juga mengalami kerugian yaitu naiknya tingkat pinjaman bermasalah menjadi 25%. Sistem perbankan yang sudah lemah semakin melemah lagi setelah adanya krisis. Sektor perbankan China menjadi tidak layak secara komersial.

Korea Selatan dan Indonesia dapat melewati krisis ini karena bantuan dari IMF. Sedangkan, China mampu melewati krisis ini bukan karena bantuan dari IMF. China mengalami masa transisi selama 30 tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 2008, dari sistem ekonomi terpusat yang diikuti industrialisasi Uni Soviet yang kemudian menjadi sistem ekonomi pasar. China juga menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing. Sejak saat itu juga, China telah menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sektor teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China.

Cadangan devisa China melonjak dari US \$ 840 juta pada tahun 1979 menjadi US \$ 154,7 miliar pada tahun 1999. Secara absolut, cadangan devisa China berada di peringkat kedua di dunia. Pada tahun 1997 China juga mengalami peningkatan pendapatan domestik bruto hingga 15%. Pada tahun 1998, hutang luar negeri jangka panjang menyumbang 88,1% dari total hutang, sementara hutang jangka pendek hanya menyumbang 11,9%. Berikut adalah tabel yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan PDB China dari tahun 1991-1999.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh China dalam menghadapi krisis tersebut yang pertama adalah menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing.

Kedua, China juga menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sector teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China.

Ketiga, Pemerintah China melonggarkan kontrol pada akun giro, namun masih memperhatikan serangkaian kontrol pertukaran pada akun modal. Langkah keempat, Pemerintah China juga bijak dalam mengontrol arus masuk modal atau investasi dan juga menggunakan kebijakan moneter yang terkendali.

Kelima, Pemerintah China memberikan kebebasan pada penduduk maupun bukan penduduk agar dapat membeli mata uang asing untuk transaksi modal atau meminjam Renmibi untuk penjualan ke depan secara bebas namun dalam jumlah yang telah dibatasi oleh Pemerintah.

Terakhir, China mampu mengatur dengan baik arus modal yang masuk berbentuk investasi langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)*, yaitu investasi riil di pabrik, peralatan modal, dan fasilitas produktif lainnya.

Adanya kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah China dalam hal pertukaran mata uang, kegiatan ekonomi pasar, ataupun masuknya arus modal, semuanya tetap di kontrol dengan baik sehingga dapat membuat China berada dalam posisi yang aman jika dibandingkan dengan negara negara lain.

Selain itu, China juga memiliki juga memiliki cadangan devisa yang cukup besar yaitu senilai lebih dari US\$154,7 miliar sehingga ketika negara negara lain mulai jatuh setelah adanya krisis, seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan lain lain, China masih tetap stabil walaupun negara negara mitra nya tidak. Hubungan bilateral yang terjalin antara China dengan negara negara di Asia, khususnya Asia Tenggara masih tetap berlangsung setelah adanya krisis keuangan Asia.

Sedangkan, Indonesia memiliki kebijakan kebijakan tersendiri dalam menghadapi krisis. Untuk mengurangi tekanan depresiasi Rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta

asing oleh perbankan, perubahan system nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan. Berbagai langkah tidak sepenuhnya berhasil menahan laju depresiasi rupiah karena krisis dimaksud dalam waktu singkat telah berkembang dari semula krisis moneter menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis politik sehingga menjadi krisis multidimensi.

Berkaitan dengan penyelesaian hutang luar negeri jangka pendek perusahaan swasta, Pemerintah membentuk INDRA yang berfungsi sebagai lembaga perantara antara perusahaan debitur dan kreditur luar negeri. Dalam perkembangannya, INDRA melakukan penyesuaian atas skim-skim kredit tersebut. Berkaitan dengan program INDRA, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Prakarsa Jakarta yang berfungsi sebagai fasilitator bagi perusahaan-perusahaan yang menghadapi masalah dalam menyelesaikan pinjamannya sehingga debitur dapat memilih untuk mengikuti program INDRA atau memilih cara lain, seperti *debt to equity swap* dan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 1998 satuan tugas tersebut telah menangani 122 kasus dengan nilai utang sebesar USD15,5 milyar. Dalam hal hutang luar negeri sektor pemerintah, dilakukan upaya restrukturisasi melalui penandatanganan MOU Paris Club pada 23 September 1998 dengan kreditur yang diwakili oleh 17 negara donor. Perjanjian tersebut menandai adanya penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dalam masa konsolidasi, yakni terhitung sejak awal Agustus 1998 hingga akhir Maret 2000. Berdasarkan MOU Paris Club, pinjaman yang akan direstrukturisasi berjumlah USD4,2 milyar, terdiri dari pinjaman lunak sebesar USD1,2 milyar dan fasilitas kredit ekspor sebesar USD3 milyar. Pinjaman lunak dijadwalkan kembali atau dibiayai dengan pinjaman baru berjangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak. Fasilitas kredit ekspor dibiayai kembali atau dijadwalkan dengan jangka waktu 11 tahun, termasuk masa tenggang 3 tahun dengan tingkat bunga pasar.

6. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia (Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia)*, Jakarta, Erlangga, 2002.

Chow, Gregory, *Memahami Dahsyatnya Ekonomi China*, Solo, Tiga Serangkai, 2011.

Dhenoon, David, *The Economic Strategic and Rise of China and India Asian Realignments After the 1997 Financial Crisis*, New York USA, Palgrave Macmillan, 2007.

Fritz and A. Rocha Menocal, *Rebuilding Developmental States: From Theory to Practice*. London, Overseas Development Institute, 2006.

Haggard, Stephan, *The Political Economy of Asian Financial Crisis*, Institute for International Economics, Washington DC USA, 2000.

Harvie, Charles & Hoa, Tranvan, *The Causes and Impact of the Asian Financial Crisis*, ST. Martin's Press Inc, 2000.

Gilpin, Robert, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. New Jersey: Picenton University Press, 2001.

Goldstein, Morris, *The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications*, Institute for International Economics, Washington DC USA, 2000.

Gul, Ferdinand & Tsui, Judy, *The Governance of East Asian Corporations Post Asian Financial Crisis*, New York USA, Palgrave Macmillan, 2004.

Shenkar, Oded, *The Chinese Century*, Jakarta, PT Abana Ilmu Populer, 2014.

Thorsen, Dag & Amund, Lie, *What Is Neoliberalism?*, Department of Political Science University of Oslo, 2006.

Yueh, Linda, *The Economy of China*, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, Inc, 2010.

Yun-Wing, Sung, *The Emergence of Greater China*, New York USA, Palgrave Macmillan, 2005.

Wells, Frederick, *A History of China*, Yogyakarta, Indoliterasi, 2016.

Weber, E.J. *The IMF and Indonesia: Two Equal Partners*, 1998.

Website dan Jurnal

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_cina

[China's Statistics Department-General: "Official gazette on the statistics on the national socioeconomic development of the People's Republic of China in 2004", released on 28 February 2005 \(People's Daily\) Beijing.](#)

<https://www.chinahighlights.com/hong-kong/article-macau-hk.htm>

www.cia.go.theworldfactbook: China

data.worldbank.org

<https://news.detik.com/berita/3662276/dubes-ri-ingin-hubungan-bilateral-dengan-singapura-ditingkatkan>

<http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/subindex/en/Economic-Forum/1X31YC00/1/0.htm>

<https://finance.detik.com/industri/d-3872536/ri-singapura-tingkatkan-kerja-sama-industri>

www.ft.com.ChinaGDPgrowthpointsto2017economicrebound,17July2017

<https://www.gov.hk/en/about/abouthk/facts.htm>

<https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2018/05/342872/hubungan-diplomatik-china-malaysia-lebih-kukuh>

www.imf.org. IMF Country Focus: China's Economic Outlook in six charts, August 15, 2017

<https://interpretermaxima.wordpress.com/2013/05/13/imf-amerika-serikat-dan-krisis-finansial-asia-1997-1998/>

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/ASEAN-China-Centre-Mendorong-Penguatan-Kerja-Sama-ASEAN---RRT.aspx>

<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerjasama-ASEAN-dan-Mitra-Wicara.aspx>

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-Hubungan-Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-Tiongkok.aspx>

<https://www.kompasiana.com/5af6b518f133441519500cd2/krisis-moneter-yang-di-alami-indonesia-pada-tahun-1997-1998?page=all>

https://www.kompasiana.com/rezatama_02/585bda4e04b0bd131d22216d/hubungan-indonesia-dengan-china

<https://www.merdeka.com/politik/singapura-cina-tingkatkan-hubungan-bilateral-zox1thb.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/08/07401031/Indonesia-Brunei.Jalin.Kerja.Sama.Kesehatan.dan.Perdagangan>

<https://www.viva.co.id/tag/kerjasama-indonesia-china>

<https://www.ajarekonomi.com/2016/04/mengenang-kembali-krisis-ekonomi-asia.html>

<https://web.archive.org/web/20080119053435/http://www.info.gov.hk/info/hkbrief/eng/ahk.htm>

OECD Economic Surveys: China, March, 2017

Thailand Financial Crisis, it's causes, consequences and implications, March 2007.

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_1_41_/ai_n29325863?pg_2/?tag=content;coll

World Bank. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Economy Profile 2017: China, 2017